

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sering melanda perekonomian suatu negara sangat penting untuk di cermati serta ditemukannya solusi untuk menanggulangnya. Karena banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan apabila terjadi Tingkat pengangguran yang tinggi (Muslim, 2014).

Menurut Sukirno, (2021) dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk berpendapatan terendah. negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan pembangunan ekonomi tidak mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Karenanya masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius (Oktarima, 2021).

Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari Indonesia, tidak luput dari masalah pengangguran. Pengangguran merupakan perbincangan yang penting karena kurangnya tenaga kerja dan lapangan kerja yang masih minim telah dibahas dan tercermin dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan keberadaan yang layak bagi manusia”.

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa masalah pengangguran menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah (Saragih et al., 2023).

Keberhasilan Pembangunan ekonomi dapat di ukur dari peningkatan kesempatan kerja. Namun disuatu daerah tidak terlepas dari penanganan masalah ketenagakerjaan khususnya penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. meningkatnya angka pengangguran mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja.

Pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja dalam pasar bertambah, meskipun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu di iringi dengan permintaan tenaga kerja. Gambaran masalah ketenagakerjaan di Indonesia semakin memburuk pada tahun 2020 ketika pandemi covid-19 mulai mewabah bahkan di seluruh dunia di mana kondisi ini bukan hanya menyebabkan krisis kesehatan tetapi juga menyentuh perekonomian. Dampak dari pandemi ini aktivitas perekonomian menjadi terhambat dan banyak perusahaan terpaksa membatasi jumlah tenaga kerja dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja. hampir semua masyarakat merasakan dampak dari pandemi Covid-19 termasuk penyerapan tenaga kerja (Fikry, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah persentase penduduk miskin, penduduk miskin sering kali memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan keterampilan, sehingga sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja formal. Ketiadaan pendidikan yang memadai menyebabkan mereka hanya mampu mengakses pekerjaan di sektor informal yang tidak stabil dan berpenghasilan rendah. Semakin besar jumlah penduduk miskin, semakin tinggi potensi terjadinya pengangguran. Hal ini disebabkan keterbatasan akses kelompok tersebut terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar tenaga kerja (Bangun, 2021). Situasi ini menciptakan siklus kemiskinan, di mana menghalangi investasi pendidikan dan pelatihan, sehingga memperpanjang ketidakmampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Selain itu, kemiskinan berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Mayoritas orang miskin memiliki daya beli yang rendah, yang menghambat pertumbuhan teori Lingkaran Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty) kemiskinan dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, ketika pendapatan masyarakat rendah, permintaan terhadap barang dan jasa juga rendah, sehingga mengurangi insentif untuk investasi juga menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran.

Berikut penyerapan tenaga kerja, jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Penyerapan Tenaga Kerja dan Jumlah
Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran
terbuka Di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

Tahun	Penyerapan Tenaga Kerja (Juta Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
2020	4.091.383	12,66	5,51
2021	4.179.708	12,84	4,98
2022	4.289.704	11,90	4,63
2023	4.399.659	11,78	4,11
2024	4.480.100	10,97	3,86

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, 2025

Berdasarkan tabel 1 Jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan, dimana pada tahun 2020-2021 tingkat pengangguran Sumatera Selatan sebesar 5,51 (persen) angka ini merupakan dampak langsung dari pandemi covid-19 yang mempengaruhi lebih dari 4.091.383,00 orang usia kerja di Sumatera Selatan dalam berbagai bentuk seperti pengangguran, bukan termasuk dalam angkatan kerja, atau pengurangan jam kerja. Tahun 2022-2023 terjadi masa pemulihan penyerapan tenaga kerja dan penurunan TPT. Pada tahun 2024 penyerapan tenaga kerja terus meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2024 sebesar 4.480.100,00 dibanding pada tahun 2020 hal ini menunjukkan fenomena pemulihan penyerapan tenaga kerja di Sumatera Selatan yang ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka terus meningkat. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, Hal ini dikarenakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha dengan peningkatan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja pada periode tersebut. Walaupun jumlah penduduk bekerja terus meningkat setiap tahun namun

dilapangan menunjukkan bahwa tenaga kerja menghadapi masalah ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Banyak pencari kerja lulusan SMA/SMK tidak memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan, sehingga lebih banyak terjebak disektor informal. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja justru pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang bersifat padat karya namun tidak berpenghasilan tinggi. Sementara sektor formal seperti industri dan jasa modern membutuhkan keterampilan yang belum dimiliki oleh sebagian besar angkatan kerja. Penyerapan tenaga kerja memang meningkat, tetapi kualitasnya rendah karena ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan lowongan pekerjaan, sehingga banyak pekerja masuk sektor informal dan berpenghasilan minim.

Permasalahan penyerapan tenaga kerja dimana penduduk usia kerja yang semakin bertambah seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ketahunnya mengakibatkan penawaran tenaga kerja. Hal menimbulkan peluang bekerja yang semakin kecil saat lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sedikit, sehingga timbulnya persaingan didunia kerja baik pencari kerja maupun pekerja yang harus mempertahankan pekerjaannya. Selain itu, permasalahan pada penempatan tenaga ada dikarenakan lebih banyaknya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan jumlah lowongan kerja yang ada. Selain itu terdapat ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Sehingga banyak pencari kerja belum ditempatkan. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, dikarenakan tenaga kerja bukan hanya tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera

Selatan saja. Diperlukan adanya perbaikan kurikulum pelatih yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada. Perbaikan mekanisme pelaporan dari kerjasama dari kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi agar terjalin komunikasi yang baik guna bersama-sama mencari titik temu dari permasalahan bidang ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan juga di perlukan banyak pelatihan tenaga untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, kompetensi serta produktivitas tenaga kerja (Akbar et al., 2024).

Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 tercatat 12,66 persen, kemudian sedikit meningkat menjadi 12,84 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan mencapai 10,97 atau sekitar 984,3 ribu jiwa. Pada Desember 2024 jumlah ini menurun menjadi 948,84 ribu jiwa. Namun di beberapa kabupaten seperti Musi Rawas Utara, angka kemiskinan mencapai lebih dari 17 persen, menunjukkan adanya disparitas antar wilayah.

Fenomena ini mengindikasikan meskipun TPT relatif rendah ($< 5\%$), masih terdapat masalah struktural, terutama kemiskinan yang tetap signifikan. Penurunan kemiskinan, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat bergerak keluar dari garis kemiskinan, tetapi hubungan antara kemiskinan dan pengangguran tidak selalu berpengaruh

Meskipun angka kemiskinan di Sumatera Selatan terus menurun fenomena kemiskinan masih nampak jelas melalui tingginya kasus stunting pada anak diberbagai daerah. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang dipengaruhi

oleh kurangnya asupan gizi, sanitasi buruk, dan rendahnya pendidikan orang tua semuanya merupakan masalah yang identik dengan rumah tangga miskin.

Di Sumatera Selatan kasus stunting banyak ditemukan didaerah Oku selatan, Banyuasin, Musi rawas Utara dan desa-desa terpencil. Angka kemiskinan memang mengalami penurunan, tetapi fenomena dilapangan menunjukkan bahwa kemiskinan tetap terlihat nyata melalui tingginya stunting, rendahnya kualitas gizi dan keterbatasan akses layanan kesehatan dasar.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Selatan pada agustus 2024 tercatat sebesar 3,86 persen. Meskipun angka ini relatif rendah, namun jumlah pengangguran absolut masih besar hal ini menunjukkan bahwa penurunan TPT tidak selalu berarti berkurangnya jumlah pengangguran secara nyata.

Pengangguran di Sumatera Selatan memang mengalami penurunan secara angka, tetapi masih didominasi pengangguran terdidik akibat ketidaksesuaian keterampilan dan terbatasnya lapangan kerja formal.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebelumnya tentang apakah Penyerapan Tenaga Kerja dan Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Selatan. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja (X_1), dan Jumlah Penduduk Miskin (X_2) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di baik secara persial maupun secara simultan di Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di baik secara persial maupun secara simultan di Sumatera Selatan tahun 2004-2024.